

Ada Gelagat Korupsi dalam Pengelolaan Migas

Rabu, 18-06-2013



JAKARTA—Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof. Dr. Din Syamsuddin menengarai adanya gelagat korupsi dan manipulasi dalam pengelolaan Migas kita. Hal itu disampaikan Din kepada muhammadiyah.or.id Selasa (18/6/2013) siang di Jakarta. Menurutnya, harus diusut tuntas Parpol-parpol mana yang melakukan manipulasi itu.

“Kenaikan harga BBM juga tidak terlepas dari mengacunya harga BBM dalam negeri kepada harga minyak dunia. Padahal MK melalui keputusannya pada 2003 sudah membatalkan Pasal 28 ayat F UU Migas yang intinya harga BBM dalam negeri tidak boleh mengacu pada harga pasar bebas dunia,” ujar Din.

Kepada muhammadiyah.or.id Din mengaku mendapatkan berita yang cukup menarik untuk dipelototi. Berita yang didapatnya adalah pengakuan orang dalam Pertamina melalui jejaring sosial. Disebutkan bahwa rencana kenaikan harga BBM itu sebenarnya Pemerintah tidak mengeluarkan subsidi dari APBN jika melihat harga BBM sebesar Rp. 4.500,- saat ini.

“Info ini sudah beredar di masyarakat secara terbatas. Disebut bahwa istilah subsidi sebenarnya sebuah kebohongan Pemerintah dan Pertamina. Karena, harga premium dan solar dari Russian Oil itu hanya 425 USD/liter. Namun melalui Petral angka tersebut dimark up 300 USD sehingga harganya menjadi 725 USD, dan oleh Pertamina angka mark up disempurnakan menjadi 950 USD. Harga itulah yang kemudian disebut sebagai harga pasar yang mengharuskan adanya istilah subsidi tersebut,” ujar Din mengutip info yang diterimanya.

Din Syamsuddin berharap, aparat segera mengusut tuntas persoalan itu, dan jika memungkinkan segera diusut siapapun yang terlibat, termasuk oknum-oknum pimpinan Parpol yang bermain migas. Termasuk, Parpol mana yang ikut memanipulasinya. (mst)#